

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI yang menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang yudikatif. Sejalan bergulirnya sistem pemerintahan RI menuju reformasi total disemua instansi pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut agenda kebijakan tentang reformasi khususnya di bidang hukum, peradilan dan birokrasi sebagaimana telah dilaksanakan pada periode rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) sebelumnya akan semakin mendapatkan perhatian pemerintah untuk ditingkatkan. Lebih khusus lagi dalam upaya menangani isu birokrasi kecenderungannya lebih difokuskan pada reformasi birokrasi antara lain reformasi para penyelenggara birokrasi atau aparaturnya dan penegakan hukum serta transparansi. Peningkatan Profesionalisme aparatur tenaga peradilan dan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyusun rencana strategis (renstra) tahun 2015 – 2019 berdasarka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015 – 2025.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila di tata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada di

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Rencana strategis ini akan dijabarkan kedalam program kegiatan yang kemudian diuraikan ke dalam rencana kegiatan. Rencana strategis supaya berhasil dengan memerlukan dukungan baik dari segi anggaran, sumber daya manusia untuk pelaksanaannya maupun sarana prasarana penunjang kegiatan. Rencana strategis yang disusun ini diharapkan dapat mendukung visi dan misi dari Mahkamah Agung RI. Visi Mahkamah Agung RI yaitu : “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung “. Dan visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah : “ Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung “.

Selain diarahkan agar lembaga peradilan dapat dengan baik menjalankan tugas-tugas pokok sebagai lembaga peradilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, juga diperlukan adanya dukungan tata kelola lembaga peradilan yang baik yang memungkinkan masyarakat secara mudah menjangkau lembaga peradilan termasuk membuat masyarakat mengerti dan memahami arti keberadaan lembaga peradilan. Untuk itulah layanan-layanan prima yang diberikan dalam kerangka tata kelola lembaga peradilan yang baik mutlak dilakukan oleh lembaga peradilan. Sebagai pelaksana dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan sejak saat itu Peradilan Tata Usaha Negara berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Prinsip peradilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan didunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggung jawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan seluruh agenda termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good government).

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya mengacu pada arah kebijakan nasional yakni mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri dan transparan.

Program kerja pembaruan peradilan terlaksana dan terus menuju cita-cita yang diimpikan warga peradilan termasuk independensi organisasi dan keuangan Mahkamah Agung dalam peningkatan sumber daya manusia. Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus mempertanggungjawabkan kinerja pada masyarakat pencari keadilan.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah pada umumnya dan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada khususnya.

Aspek strategis organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses mencari keadilan dimana keadilan tersebut merupakan ujung tombak bagi pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai beberapa aspek strategi yang harus dijalankan untuk mencapai suatu pengadilan yang berkualitas. Beberapa aspek strategi tersebut adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Kedua aspek tersebut mempunyai pertanggung jawaban yang nilainya dapat dijadikan acuan kedepan yang lebih baik. Kedua sasaran strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Indikator Kinerja Utama yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari rencana strategis kita. Dari rencana strategis yang disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan juga potensi-potensi yang ada

Pembahasan dan potensi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal yang terdiri dari kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness) serta analisis faktor eksternal yang terdiri dari peluang (opportunity) dan tantangan yang dihadapi seperti yang telah disinggung sedikit pada maksud dan tujuan adanya Blue Print Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai 2 analisis yang harus dijabarkan dan diketahui untuk dapat mencari solusi yang tepat guna penanggulangan permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Analisis Faktor Internal

a. Kekuatan (strenght)

Kekuatan-kekuatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyangkut hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian. Hal-hal tersebut mencakup :

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah propinsi DKI Jakarta.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara Tata Usaha Negara di tingkat banding.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan penentu keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membawahi 7 (tujuh) Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Kelemahan (weakness)

Kelemahan-kelemahan yang terdapat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dirinci dalam beberapa aspek, sebagai berikut :

Aspek Proses Peradilan

- Belum maksimalnya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Kurangnya tenaga administrasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sesuai dengan kompetensinya.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi.

Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dalam arti masih kurang untuk menutupi kebutuhan dan rencana yang diajukan.

2. Analisis Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk melakukan reformasi / perbaikan dapat ditinjau dengan beberapa aspek sebagai berikut :

Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berupa internet dan website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

b. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Tantangan-tantangan yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang akan dihadapi dan dipikirkan jalan keluarnya (solusinya) untuk dapat dilakukan reformasi / perbaikan sebagaimana yang diharapkan adalah sebagai berikut :

Aspek Proses Peradilan

- Belum adanya alat / media yang dapat mengukur kepuasan pengguna jasa peradilan sehingga belum dapat diketahui sejauh mana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada pencari keadilan.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum seluruhnya dapat menguasai teknologi informasi.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah diupayakan penyelesaian penanganan perkara terutama permasalahan administrasi perkara banding lebih cepat.

- Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi.

Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Bagan Potensi dan Permasalahan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan voorpost (kawal depan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tata usaha negara di tingkat banding • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan pengambil atau penentu keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membawahi 7 (tujuh) Pengadilan Tata Usaha Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek Proses Peradilan <ul style="list-style-type: none"> - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta • Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek Proses Peradilan <p>Adanya website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara</p> • Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja 2. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia • Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan koordinasi yang baik antar 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek Proses Peradilan <p>Belum tersedianya suatu alat/ media yang dapat mengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan sehingga belum dapat diketahui sejauh mana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan kepada pencari keadilan</p> • Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan <p>Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum seluruhnya dapat menguasai teknologi informasi.</p> • Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah diupayakan penyelesaian

	<p>Negara Jakarta.</p> <p>3. Kurangnya tenaga administrasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sesuai dengan kompetensinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya sistem manajemen perpustakaan yang berbasis teknologi informasi. • Aspek Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. 	<p>Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.</p> <p>2. Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Sarana dan Prasarana <p>Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berupa internet dan website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta</p> 	<p>penanganan perkara terutama permasalahan administrasi perkara banding lebih cepat..</p> <p>2. Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Sarana dan Prasarana <p>Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan.</p>
--	--	--	--

Permasalahan yang dihadapi :

1. Masalah Akses

Masyarakat dan pencari keadilan yang dulu mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara maupun mengakses putusan pengadilan sekarang ini dengan adanya aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dapat menikmati kemudahan mengakses perkara yang diinginkan. Informasi pengadilan merupakan komoditas yang membuka peluang praktek transaksional yang pada akhirnya berdampak pada bertambahnya kepercayaan publik terhadap badan peradilan. Padahal keterbukaan

sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum. Proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan dan setelah terbitnya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusana Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007. Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik serta informasi yang dikecualikan. Diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi. Tapi ada kendala yang harus dipikirkan yaitu bagaimana informasi tentang hukum itu bisa sampai ke pelosok masyarakat yang terpencil dimana masyarakat tersebut tidak semuanya bisa mendapatkan informasi tersebut. Dikarenakan keterbatasan masalah teknologi dan juga keadaan lingkungan.

2. Masalah lambatnya waktu penyelesaian perkara

Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut maka Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012

tentang Standar Pelayanan Peradilan. Selanjutnya disusul dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis informasi teknologi dan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

3. Masalah Sumber Daya Manusia

Masalah kebutuhan sumber daya manusia memang menjadi masalah kesekretariatan. Kebutuhan tenaga staff yang saat ini benar-benar diperlukan belum mendapat respon yang baik dari Mahkamah Agung RI. Ini bukan tidak ada subyeknya tetapi juga harus dilihat dari keseluruhan tenaga yang dibutuhkan oleh pemerintah dan anggaran yang dimiliki untuk membiayai semua tenaga tersebut. Tetapi mau tidak mau semua itu harus dipenuhi demi lancarnya proses manajemen organisasi suatu instansi terutama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta khususnya.

4. Masalah Integritas

Isu integritas justru melanda peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan masyarakat, namun kenyataannya memang memprihatikan. Kasus korupsi memang sangat rawan sekali dan ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasikan secara empiris. Disisi lain indikator utama justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Lembaga peradilan ditempatkan sebagai lembaga yang sering terjadi korupsi. Di Indonesia lembaga peradilan tidak menempati yang sering terjadi korupsi, tetapi pada kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu ditangani secara serius agar kepercayaan publik atau masyarakat tidak semakin menurun dengan banyaknya oknum peradilan yang terkena operasi tangkap tangan (OTT).

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman tingkat banding bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan pengadilan tingkat banding dan untuk Pengadilan Tata Usaha Negara ada 7 Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah naungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Keberadaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diharapkan dapat memberikan kontribusi penyelesaian sengketa-sengketa Tata Usaha Negara sebagai wujud kepedulian Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang meliputi 7 wilayah satuan kerja yaitu :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
6. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
7. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai salah satu lembaga / badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah peradilan tingkat banding yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Setiap lembaga peradilan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen, tidak memihak dan kompeten merupakan salah satu komponen utama pencitraan dalam suatu negara hukum, namun demikian bukan berarti bahwa prinsip-prinsip independensi tersebut dapat mengesampingkan prinsip akuntabilitas maupun transparansi, karenanya warga peradilan haruslah mempunyai pemahaman yang memadai dalam hal tersebut.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah salah satu pengadilan tingkat banding yang mempunyai **tugas pokok** menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding antara orang atau badan

hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat pencari keadilan
- Memberikan keterangan dan pertimbangan tentang hukum kepada instansi pemerintah atau badan hukum atau perseorangan di daerah hukumnya apabila diminta.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur peradilan yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merumuskan visi atau suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimana visi tersebut relevan dengan rumusan visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Dan adapun Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah :

**“ MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
YANG AGUNG “**

Mahkamah Agung RI melalui cetak birunya atau Blue Print telah menuangkan berbagai macam usaha perubahan dan perbaikan demi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung di seluruh Indonesia secara ideal, dan melalui perubahan dan perbaikan tersebut semua Badan Peradilan diharapkan :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi (IT) terpadu.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilengkapi dengan struktur organisasi yang terbagi dalam kepaniteraan yang merupakan unsur pendukung teknis yustisial dan bagian kesekretariatan yang merupakan unsur penunjang administratif.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian-pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam tahun 2019.

Capaian kinerja (*performance result*) 2019 tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta disusun sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang organisasi yang berisikan aspek strategis organisasi dengan potensi dan permasalahan utama, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dan sistematika penyajian ;
- Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang ikhtisar perjanjian kinerja yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama
- Bab III : Akuntabilitas kinerja berisikan tentang capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran tahun 2019
- Bab IV : Penutup berisikan kesimpulan dan langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk tahap pertama harus dilihat dari Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja Utama ini merupakan dasar dari berjalannya sebuah roda organisasi yang telah mempunyai tujuan, sasaran strategis dan juga program yang digunakan. Dari Indikator itu pula dapat dibuat

sebuah gambaran kearah mana organisasi ini dijalankan. Pada awal tahun diharuskan membuat sebuah rencana kinerja dimana rencana kinerja tersebut dibuat setiap tahunnya.

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama maka **Rencana Strategis** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di bawah ini :

No .	Rencana Strategis	Indikator Rencana Strategis
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Prosentase penurunan sisa perkara d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), harus memperhatikan faktor-faktor tertentu, kondisi dan kemanfaatan IKU yaitu sebagai berikut :

- Pemilihan dan penetapan IKU :
Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur ;
- Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi
- Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain :

Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Tahunan, Penyusunan Dokumen
Penetapan Perjanjian Kinerja.

		<p>c. Prosentase penurunan sisa perkara</p> $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara adalah : perkara yang belum diputus pada tahun berjalan <p>a. Perkara Gugatan : 0 – 12 x 100 % : 0 %</p> <p>b. Perkara Banding : 28-30 x 100 % : 93 %</p>	Ketua PT	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		<p>d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kasasi Peninjauan Kembali $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan</p> <p>a. Perkara Kasasi : $\frac{0}{0} \times 100\% : 0\%$</p> <p>b. Perkara PK : $\frac{0}{0} \times 100\% : 0\%$</p>	Ketua PT	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan tingkat banding yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Jumlah putusan = Jumlah perkara yang diputus dalam tingkat banding</p> <p>$\frac{334}{338} \times 100 : 98,82\%$</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Semesteran Laporan Tahunan

		<p>b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus</p>	<p>Jumlah putusan yang diakses dalam 1 hari x 100% Jumlah perkara diputus</p> <p>Catatan : Jumlah putusan sengketa pilkada $\frac{0}{0} \times 100 \% : 0 \%$</p>	<p>Panitera</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Semesteran • Laporan Tahunan
--	--	--	---	-----------------	---

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat banding dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan strategis harus disesuaikan dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan visi dan misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berusaha melaksanakan apa yang menjadi tujuan dalam organisasi.

Tujuan strategis yang termuat dalam rencana strategis maka untuk melaksanakan misi tersebut dengan baik maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang pasti transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara dengan fasilitas teknologi.
3. Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima.

Dengan tujuan strategis maka ditetapkan indikator tujuan sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase masyarakat yang percaya pada sistem peradilan 	80%
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara dengan fasilitas teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase perkara yang ditangani tepat waktu 	85%
3.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan 	98%

Dari 3 (tiga) tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini dapat memacu dan berusaha untuk dapat memenuhi tujuan tersebut agar menjadi pengadilan yang diharapkan sesuai dengan misi pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu “ **Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung** “.

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama maka **Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta** di bawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	e. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. f. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu g. Prosentase penurunan sisa perkara h. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 84,93% 6,45% 99,7% 98%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu d. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	98% 100%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta “ **Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara** “

Jakarta Yang Agung”, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel :

Jumlah perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setiap tahun mengalami peningkatan, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besarpun perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Dalam peningkatan penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 4 (empat) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu :

- a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Prosentase penurunan sisa perkara
- d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
 - Kasasi
 - Peninjauan kembali

2. Terwujudnya peradilan yang efektif dan efisien.

Indikator kinerja bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan tugasnya dengan melihat :

- a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.
- b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus

Untuk **sasaran strategis kesekretariatan** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta menyiapkan suatu sasaran yang harus dicapai yaitu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya manajemen pelayanan di lingkungan PTTUN Jakarta	* Jumlah dokumen tata kelola di lingkungan PTTUN Jakarta * Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan * Penyelenggaraan operasional	90% 8,1% 99,8%
2.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan prima peradilan	* Jumlah sarana dan sarana sesuai standar	99%

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 2 sasaran strategis di bagian kepaniteraan dan 2 Sasaran strategis dibidang kesekretariatan yang diajukan dari intansi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan dilihat perkembangannya dari tahun 2016 – 2018 serta target atau rencana yang harus ditempuh tahun 2016 – 2020 atau sasaran strategis jangka menengah yang harus dilaksanakan oleh bagian kepaniteraan dan kesekretariatan yaitu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Sisa perkara yang diselesaikan b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Penurunan sisa perkara d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 92% 4% 99% 97%	100% 84,93% 6,45% 99,7% 98%	100% 91,73% 6,73 % 99,7% 98%	100% 100% 100% 100% 100%	100 % 100% 100% 100% 100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat	98%	98%	98%	100%	

		waktu b. Daftar perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%	100%	100%	100%	
--	--	--	------	------	------	------	--

Sasaran strategis kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

jangka menengah adalah sebagai berikut :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya manajemen pelayanan di lingkungan PTTUN Jakarta	* Jumlah dokumen tata kelola di lingkungan PTTUN Jakarta	90%	90%	90%	90%	90%
		* Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,2 %
		* Penyelenggaraan operasional	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%
2.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan prima peradilan	* Jumlah sarana dan sarana sesuai standar	99%	99%	99%	99%	99 %

Untuk rencana strategis pada bagian kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibuat berdasarkan keadaan yang ada dimana keadaan yang sekarang telah mengalami kemajuan tertib administrasinya. Ini dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini :

➤ Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima

1. Meningkatnya manajemen pelayanan di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di sini dijabarkan mengenai :

a. Jumlah dokumen tata kelola di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Dokumen yang di buat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini telah mencakup seluruh kegiatan yang ada di instansi, dari laporan bulanan yang dilaporkan oleh bagian kepaniteraan telah dilakukan setiap bulan ke bagian rencana program dan anggaran dan dikirim ke Mahkamah Agung dan laporan tahunan yang dilaporkan setiap akhir tahun ke bagian rencana program dan anggaran dan juga ke Mahkamah Agung.

Begitu pula untuk bagian kesekretariatan membuat laporan pada awal tahun Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani oleh pimpinan dan akhir tahun membuat laporan kinerja instansi pemerintah yaitu tentang segala kegiatan dan rencana kedepan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjadi pengadilan yang dapat diandalkan.

b. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan

Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan dan memahami tugas masing-masing pegawai dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan kualitas SDM. Kebutuhan tenaga yang sangat potensial sangat diperlukan maka perlu diberi bimbingan dan pembinaan dalam meningkatkan potensi SDM itu sendiri dan untuk mendapatkan aparatur peradilan yang handal.

c. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan pimpinan

Penyelenggaraan operasional perkantoran merupakan dukungan yang cukup vital bagi aparatur sipil negara untuk menunjang kinerja dan kegiatan yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Dipenuhinya segala kebutuhan dari tercukupinya gaji pegawai hingga pemenuhan segala fasilitas sangat

menunjang kinerja aparatur sipil negara untuk menyokong majunya peradilan yang ada di Indonesia.

2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan prima peradilan

- Jumlah sarana dan prasarana sesuai standar

Peningkata sarana dan prasarana aparatur yang dikeluarkan atau dibuat Mahkamah Agung RI dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan bagi pengadilan sesuai anggaran yang diajukan. Pemenuhan tersebut untuk menunjang kinerja aparatur peradilan agar dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan visi pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, “ Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung “.

D. PROGRAM UTAMA

Tujuan dan sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam tahun 2015-2019. Tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai program utama dari sumber anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 3 (tiga) program tersebut adalah :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung RI ;

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN ;

Manajemen yang baik akan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang melaksanakan tugas pokok sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan dalam masalah sengketa dengan pejabat tata usaha negara.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI ;

Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana tersebut baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun kebutuhan aparaturnya Peradilan Tata Usaha Negara.

Disamping itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga mempunyai 3 program yang dijalankan untuk menunjang kinerja aparatur peradilan yaitu :

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2019
1.	Program peningkata manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis dan tertib administrasi perkara di lingkungan peradilan TUN 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya proses penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel b. Terselenggaranya tertib administrasi perkara di lingkungan PTTUN Jakarta 	<p>90%</p> <p>100%</p>
2.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di PTTUN Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dokumen tata kelola di lingkungan PTTUN Jakarta • Jumlah pegawai yang melakukan pembinaan • Penyelenggaraan operasional perkantoran dan pimpinan 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
3.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan PTTUN Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sarana dan prasarana kerja sesuai dengan standar pelayanan prima peradilan 	<p>100%</p>

E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Dengan melihat tujuan, sasaran strategis dan program yang dicanangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maka dapat ditetapkan rencana kinerja tahunan yang dibuat setiap awal tahun. Rencana kinerja ini dibuat berdasarkan indikator kinerja utama yang telah dibuat. Rencana kinerja tahunan ini menggambarkan kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama 1 tahun yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Jika dalam 1 tahun sudah dapat mencapai tujuan tersebut maka bisa dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mempunyai kinerja yang baik. Berikut ini Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2019 :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(R K T) TAHUN 2019**

Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	- Program peningkatan manajemen peradilan militer dan tata usaha negara	- Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis dan tertib administrasi perkara di lingkungan PTTUN Jakarta	a. Terselenggaranya proses penyelesaian perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel	90%	Rp. 167.000.000
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	84,93%			b. Terselenggaranya tertib administrasi perkara di lingkungan PTTUN Jakarta	100%	
1.		c. Prosentase penurunan sisa perkara	6,45%	- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	- Terselenggaranya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di PTTUN Jakarta	a. Jumlah dokumen tata kelola di lingkungan PTTUN Jakarta	100%	Anggaran sesuai DIPA - Belanja pegawai Rp. 12.505.394.000 - Belanja pengadaan Rp. 1.655.098.000
		d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	99,7% 98%			b. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	100%	
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	98%	- Program peningkatan sarana dan prasarana	- Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan PTTUN Jakarta	c. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan pimpinan	100%	Belanja modal Rp. 112.500.000
		b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%			- Jumlah sarana dan prasarana kerja sesuai dengan standar pelayanan prima	100%	

				aparatur Mahkamah Agung RI		peradilan		
--	--	--	--	----------------------------------	--	-----------	--	--

F. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja tahun 2018 adalah pernyataan komitmen atau kebulatan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Penetapan kinerja ini sebagai tolok ukur terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018 sebagai wujud penerapan reformasi birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung yang penyusunannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berisikan perjanjian kinerja yang dibuat untuk menetapkan dan memantapkan pola kerja pada masing-masing bagian sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI. Perjanjian Kinerja dibuat sesuai dengan tugas masing-masing yang mempunyai tujuan agar pelayanan pengadilan terhadap masyarakat bisa semaksimal mungkin dan tidak mengecewakan para pencari keadilan.

Perjanjian kinerja adalah : Lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome

yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pihak yang menyusun perjanjian kinerja salah satunya adalah Pimpinan unit kerja (eselon I) yang mana perjanjian kinerja ditingkat unit kerja (eselon I) ditanda tangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan salah satu unit kerja (eselon I) yang harus melakukan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja ini sangat diperlukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari rencana kinerja yang sudah direncanakan sebelumnya.

Perjanjian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dilakukan setiap tahun bagi para pegawainya. Perjanjian kinerja adalah pernyataan yang dilakukan antara bawahan dengan atasan, dimana perjanjian kinerja tersebut juga diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Perjanjian Kinerja ini harus dibuat antara bawahan dengan atasan dan ditanda tangani kedua belah pihak. Perjanjian kinerja ini dilakukan untuk mewujudkan target kinerja selama 1 tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kedua belah pihak khususnya dan instansi yang bersangkutan yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada umumnya. Target kinerja yang dicapai akan dievaluasi dan akan diambil tindakan yang diperlukan jika belum tercapai. Perjanjian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Prosentase penurunan sisa perkara d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 84,93% 6,45% 99,7% 98%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	98% 100%

Perjanjian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terdiri dari 2 perjanjian untuk bagian kepaniteraan dan 3 untuk bagian kesekretariatan. Perjanjian kinerja tersebut harus diupayakan mencapai capaian kinerja yang menjadi target utama. Jika perjanjian kinerja tersebut belum dapat mencapai target maka harus dievaluasi bagian mana yang perlu dibenahi dan ditingkatkan. Perjanjian kinerja bagian kepaniteraan yang diutamakan adalah dalam hal proses peradilan dari awal hingga akhir harus pasti, transparan dan akuntabel baik untuk prosesnya maupun administrasinya. Begitu pula aparatur peradilannya, dimana pihak-pihak yang berperan aktif harus benar-benar bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dikatakan harus bersih karena di mata masyarakat lembaga peradilan terutama aparatur peradilan sudah sedikit rusak dikarenakan banyaknya terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu diupayakan kinerja perangkat peradilan harus bersih dan hasil dari keputusan hakim yang menyangkut hak orang banyak harus dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal durasi waktu proses penyelesaian perkara juga harus seefisien

mungkin. Ketua Mahkamah Agung RI juga telah menetapkan jangka waktu proses perkara agar perkara yang ditangani dapat selesai dengan hasil putusan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Untuk bagian kesekretariatan ada 3 hal yang menjadi target kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu :

- Masalah sumber daya manusia
- Masalah kesejahteraan pegawai
- Masalah penunjang layanan internal

Masalah sumber daya manusia merupakan target utama kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Dibutuhkan sekali sumber daya manusia yang cukup untuk menunjang kinerja kantor. Calon pegawai yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ke Mahkamah Agung RI sampai saat ini masih minim untuk dipenuhi. Oleh karena itu terjadi adanya pegawai yang diperbantukan ke bagian lain yang sangat membutuhkan tenaga untuk jalannya organisasi. Adanya perbantuan dari satu bagian ke bagian lain sebenarnya sedikit mengganggu kinerja bagian yang membantu karena bisa dikatakan pekerjaan utama dari pegawai tersebut sedikit terganggu dan pekerjaan yang dibantu kurang maksimal. Kurangnya pegawai terutama staff menyebabkan jalannya organisasi kurang lancar dan kurang cepat. Oleh karena itu masalah sumber daya manusia diharapkan dengan permintaan tambahan pegawai dapat dipenuhi oleh Mahkamah Agung RI.

Peningkatan dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran juga merupakan target kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Diupayakan penggunaan dan pemberian kebutuhan kantor juga dipenuhi sesuai dengan anggaran yang ada dan diusahakan permohonan penambahan anggaran untuk kesejahteraan kantor bisa dipenuhi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja.

Data-data yang diperlukan dalam pengukuran kinerja adalah dokumen Penetapan Kinerja, realisasi capaian output/outcome, pagu anggaran dan realisasi anggaran.

Terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun ada beberapa juga yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2019.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2019 maka dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2019 telah banyak mengalami perubahan pada sistem kerjanya. Peningkatan yang didapat

menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan mendapatkan dampak positif bagi pengguna atau pencari keadilan.

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan- kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap capaian kinerja dari masing-masing Sasaran dan Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1) Sasaran Kinerja : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a) Presentase sisa perkara yang diselesaikan

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan untuk Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Presentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki sisa perkara Gugatan sebanyak 0 (nol) perkara , sedangkan untuk perkara banding sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara. Penyelesaian sisa perkara tersebut ditargetkan selesai 100% pada tahun 2019, dan realisasi penyelesaian seluruh sisa perkara Gugatan pada tahun 2019 tersebut sebanyak 0 (nol) perkara, sedangkan realisasi untuk penyelesaian perkara banding pada tahun

2019 sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) perkara, sedangkan Persentase sisa Perkara yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sisa Perkara Tahun 2019	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Persentase
28	28	28	100%

Tabel : Perkara Banding Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
Tahun 2019 sesuai Jenis Perkara

No.	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	cabut	Sisa 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pertanahan	15	128	143	136	1	6
2.	Kepegawaian	7	76	83	71	-	12
3	Perijinan	1	24	25	22	-	3
4	Lingkungan Hidup	2	6	8	8	-	-
5	Badan Hukum	-	9	9	8	-	1
6	Paten	-	1	1	1	-	-
7	Lelang	-	5	5	5	-	-
8	Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum	-	1	1	1	-	-
9	Pajak	1	-	1	1	-	-
10	Lain - lain	2	90	92	84	-	
JUMLAH		28	340	368	337	1	30

Capaian Kinerja dan Waktu Penyelesaian Perkara Banding tahun 2019

Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara	One Day Publish	1-3 Bulan	4-6 Bulan	7-12 Bulan
91,85 %	334	338	0	0
	98,82 %	100 %	0,00 %	0,00 %

Amar Putusan Perkara Banding tahun 2019

Menguatkan	Membatalkan	Tidak dapat diterima (NO)	Memperbaiki	Mencabut
249	84	3	1	1
73,67 %	24,85 %	0,89 %	0,30%	0,30%

Perkara Permohonan Banding Satuan Kerja tahun 2019

No.	Satuan Kerja	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	cabut	Sisa 2019
1	PTUN BANDUNG	3	85	88	79	-	9
2	PTUN BANJARMASIN	-	11	11	10	-	1
3	PTUN JAKARTA	18	146	164	153	-	11
4	PTUN	-	14	14	14	-	-

	PALANGKARAYA						
5	PTUN PONTIANAK	4	36	40	37	1	2
6	PTUN SAMARINDA	2	30	32	29	-	3
7	PTUN SERANG	1	18	19	15	-	4
	JUMLAH	28	340	368	337	1	30

Perkara Gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2019

No.	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa 2019
1	Kepegawaian	-	11	11	-	-	11
2	Lain lain (PNBP)	-	1	1	-	-	1
	Jumlah	-	12	12	-	-	12

Capaian Kinerja Penanganan Perkara (KPP) Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

sampai dengan 31 Desember 2019

Satuan Kerja	Sisa tahun lalu	Masuk	Jum lah	Minu tasi	Sisa	% Kiner ja Penye lesai an	Lama Proses		One Day Pu blish
							1-3	3-6	

						Perka ra			
Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	28	340	368	338	30 8,15%	91,85 %	338 100%	0%	334 98,82 %
Th. 2018	66	321	387	359	28 7,24%	92,76 %	355 98,89 %	4 1,11 %	121 33,70 %
Th. 2017	60	376	436	370	66 16,14%	84,86 %	350 94,59 %	20 5,41 %	Tidak ada

Capaian Kinerja Penanganan Perkara (KPP) Pengadilan Tata Usaha Negara

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sampai dengan 31 Desember 2019

No	Satuan Kerja	Sisa Lalu	Ma suk	Jum lah	Minu tasi	Sisa	% Kiner ja Pe nye lesai an Perka ra	Lama Proses		One Day Ma nu tu ring
								1-5	5-12	
1	PTUN Bandung	55	150	205	163	42	79,51 %	151 902,6	12 7,36%	97 59,5

								4%		1 %
2	PTUN Banjarm asin	12	63	75	65	10	86,67 %	61 93,85 %	4 6,15%	53 81,5 4%
3	PTUN Jakarta	96	268	364	290	74	79,67 %	254 87,59 %	36 12,41 %	156 53,8 2 %
4	PTUN Palangka raya	6	38	44	30	14	68,18 0 %	30 100 %	0 0,00 %	12 40 %
5	PTUN Pontiana k	44	43	87	73	14	83,91 %	37 50,68 %	36 49,32 %	18 24,6 6 %
6	PTUN Samarin da	31	73	104	76	28	73,08 %	64 84,21 %	12 15,79 %	5 6,58 %
7	PTUN Serang	11	79	90	71	19	78,89 %	66 92,96 %	5 7,04 %	65 91,5 %
Jumlah 2019		255	714	969	768	201	79,26 % 2-4	663 86,33 %	105 13,67 %	406 52,8 6 %
2018		288	688	976	661	255	67,73 % 4-4	445 67,32 %	216 32,68 %	Ti dak Ada

Pencapaian kinerja organisasi selama 1 tahun dapat dilihat pada matriks rencana strategis 2019 dan pengukuran kinerja 2019. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dengan melihat hasil pengukuran kinerja tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maka berdasarkan besaran capaian kinerja sebagian besar target indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah dapat melaksanakan tugas pokok dan mencapai keberhasilan. Perubahan-perubahan ini dapat dilihat pada bagian-bagian yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu :

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA 2015 - 2019

Visi : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung

Misi : 1. Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan (Yusticial balance)

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara

4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Strategis				
						2016	2017	2018	2019	2020	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	* Prosentase masyarakat yang percaya pada sistem peradilan	80%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	* Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Terselenggaranya Pembinaan tenaga teknis dan tertib administrasi perkara di lingkungan peradilan TUN	* terselenggaranya proses penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	90%	167.000.000
					* Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	84,93 %	100%	91,73%	100 %	100%			* terselenggaranya tertib administrasi perkara di lingkungan PTTUN Jakarta		
					* Prosentase penurunan sisa perkara	15,14 %	6,45 %	7,24%	0,85 %	100%					
					* Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :										
				> Kasasi	99,7 %	99,7 %	100%	0,00 %	100%						
				> Peninjauan Kembali	98%	98%	100%	0,00 %	100%						
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara dengan fasilitas teknologi	* Prosentase perkara yang ditangani tepat waktu	85%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	*Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	98%	98%	98%	100 %	100%					
					*Prosentase perkara yang menarik	100%	100%	100%	0,00 %	100%					

3.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	* Prosentase Kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	98%	Meningkatnya manajemen pelayanan di Lingkungan PTTUN Jakarta	perhatian masyarakat yang dapat diekses dalam 1 hari setelah perkara putus	*Jumlah dokumen tata kelola di lingkungan PTTUN Jakarta	90%	91%	94%	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Terselenggaranya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di PTTUN Jakarta	a. Jumlah dokumen tata kelola dilingkungan PTTUN Jakarta b. jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan c. penyelenggaraan operasional perkantoran dan pimpinan	100%	Anggaran sesuai DIPA
						*Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	8,1%	8,1%	8,2%	100%				100%	- Belanja pegawai
						*Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan pimpinan	99,8 %	99,8 %	100%	99,8 %				100%	Rp. 12.397.215.000
						* Jumlah sarana dan prasarana sesuai standar	99%	99 %	100%	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan PTTUN Jakarta	Jumlah sarana dan prasarana kerja sesuai standar pelayanan prima peradilan	100%	- Belanja pengadaan
4.				Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan prima peradilan											Rp. 2.113.028.000
															Belanja modal
															Rp. 132.000.000

Dilihat dari matriks diatas maka bisa dilihat bahwa perkembangan di tahun 2019 ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengalami kemajuan beberapa persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tujuan, sasaran strategis dan program dapat dilihat perkembangannya yang mana menunjukkan ke arah yang lebih baik. Dari matrik tersebut dapat dibuat pengukuran kinerja yang berisikan target, realisasi dan capaian. Berikut pengukuran kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta yaitu :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan	92,76%	91,85%	99 %
		c. Prosentase penurunan sisa perkara	6,73%	0,85%	104%
		d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		- Kasasi - Peninjauan Kembali	99,7% 98%	99,7% 98%	100% 100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	98% 100%	98% 100%	100% 100%
		b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus			

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dan 2018 dan beberapa tahun terakhir

Perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja yang terjadi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengalami kemajuan atau perkembangan menuju yang lebih baik. Perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja dapat kita lihat dari perbandingan antara tahun 2018 dengan tahun 2019. Disini bisa dilihat yaitu :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019, 2018, dan 2017 .

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Prosentase penurunan sisa perkara d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 92,76% 6,45% 99,7% 98%	100% 100 % % 0,85% 99,7% 98%	100% 107% 126% 100% 100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	98% 100%	98% 100%	100% 100%

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2018**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	e. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan f. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu g. Prosentase penurunan sisa perkara h. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 92,76% 6,45% 99,7% 98%	100% 100 % % 0,85% 99,7% 98%	100% 107% 126% 100% 100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu d. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	98% 100%	98% 100%	100% 100%

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2017**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan b. Prosentase perkara yang diselesaikan c. Prosentase penurunan sisa perkara d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 92% 4% 99% 97%	100% 92% 4% 99% 97%	100% 100% 100% 100% 100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu f. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	98% 100%	98% 100%	100% 100%

**MONITORING PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PER TRI WULAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2019**

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
			TGT	REA	CP	TGT	REA	CP	TGT	REA	CP	TGT	REA	CP	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	21% %	21%	100%	27%	48 %	100%	31 %	79 %	100%	21%	100 %	
		c. Prosentase penurunan sisa perkara	10%	1,68%	26%	10%	1,68%	26%	10%	1,68%	26%	10%	1,68%	26 %	
		d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :													
		- Kasasi	99,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- PK	98%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

2.	Peningkatan efisiensi pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	24,6%	21,21 %	100%	24,6%	21,21 %	100%	24,61 %	21,21 %	100%	24,61 %	21,21 %
		b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah rencana strategis 2019

Pengukuran realisasi kinerja dilihat beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun ini mengalami kemajuan beberapa persen di atasnya. Ini menunjukkan keberhasilan kinerja pegawai dan pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan organisasinya. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan perencanaan strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah seimbang dimana perencanaan strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk target diambil dari hasil akhir rencana kinerja. Hasil akhir rencana kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan realisasi capaian kinerja tahun 2019.

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2017, 2018, 2019
DENGAN TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH
RENCANA STRATEGIS 2019**

No .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	84,93%	91,73%	100%	84,93%	84,93%	100%
		c. Prosentase penurunan sisa perkara	6,45%	6,73%	0,85%	6,45%	6,45%	6,73%
		d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	99,7% 98%	99,7% 98%	100% 100%	99,7% 98%	99,7% 98%	99,7% 98%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	98%	98%	100%	98%	98%	98%
		b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi kinerja sedikit berubah dikarenakan indikator kinerja utama untuk tahun 2017, 2018 berbeda dengan indikator kinerja utama 2019 sehingga dari tabel di atas dibuat 2 indikator kinerja utama. Untuk bagian atas indikator kinerja utama tahun 2017 dan 2018 sedangkan bagian bawah atau nomor 2 adalah indikator kinerja utama tahun 2019. Untuk target hanya mengambil tahun 2020 dan 2021 dengan indikator kinerja utama 2019.

Untuk rencana pembangunan jangka menengah yang ada di rencana strategis 2019 memakai indikator kinerja utama 2019. Ini membuat sedikit berbeda. Tapi pada dasarnya kinerja aparat peradilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengalami kemajuan. Disini sudah bisa dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah memperbaiki segala sistem organisasi menjadi lebih baik. Dari tata cara maupun personalnya.

4. Analisis Akuntabilitas Kinerja

4.1. Analisis keberhasilan kinerja

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat capaian kinerja/ keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian yang baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama dan kewenangan pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menilai keberhasilan kinerja itu dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah dapat mencapai keberhasilan yang ditunjukkan dari pencapaian

sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah diterapkan pada tahun 2019. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan analisis dan evaluasi atas hasil capaian kinerja tahun 2019, sehingga mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada rencana strategis kinerja tahun 2020-2024.

Faktor yang mendukung keberhasilan lainnya adalah berjalannya fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial perkara tingkat banding dan tingkat pertama.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi lainnya.
- a. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan juru sita pengganti sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta baik yang dilakukan secara terus menerus dan dilakukan secara berkala maupun yang sifatnya mendadak.
- b. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat pertama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Pembinaan terhadap Ketua dan Panitera disatuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah dilaksanakan dengan baik secara berkala maupun secara langsung, pembinaan secara langsung kepada semua pejabat dan pegawai telah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dan pengawasan maupun pembinaan oleh pimpinan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sementara disamping itu

juga telah dilakukan pelatihan dalam bentuk pembinaan SDM secara berkala.

- c. Melakukan sosialisasi bagi seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta satuan kerja di bawahnya guna memberikan masukan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh semua aparatur peradilan baik teknis maupun non teknis.
- d. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, umum dan keuangan kecuali keuangan perkara). Pemberian pelayanan administrasi umum juga telah dilaksanakan yang meliputi pengadaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pengelolaan kesejahteraan pegawai, pengelolaan data pegawai dan laporan pegawai, pengelolaan administrasi keuangan dan urusan umum.

➤ **Analisis Capaian Akuntabilitas Kinerja Perkara**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menggunakan dua indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Pertama, rasio penyelesaian perkara (clearance rate) yaitu perbandingan jumlah perkara masuk dan putus. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 80%, sedangkan realitanya selama tahun 2019 beban kerja di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah 12 perkara, untuk perkara banding sejumlah 368 keseluruhannya 380, sedangkan penyelesaian perkara atau beban kerja untuk perkara Tingkat Pertama 0 perkara, perkara bandingnya diselesaikan 338 perkara jadi seluruhnya 338 dibagi seluruh beban kerja 395 dikalikan 100 =

89 %, Penetapan target minimal clearance rate 100% ini karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masih memiliki tunggakan perkara. Kedua, jumlah tunggakan perkara lebih besar yang di tahun 2018, untuk perkara tingkat pertama 0 perkara dan tingkat banding 28 perkara, sedangkan untuk tahun 2019 tunggakan perkara tingkat pertama berjumlah 12 perkara untuk tingkat banding 30 perkara. Dengan demikian tunggakan beban kerja untuk tahun 2019 seluruhan berjumlah 42 perkara.

Keadaan Perkara tingkat Pertama per 31 Desember 2019

No.	Jenis Perkara	Sisa awal	masuk	putus	Sisa akhir
1.	Perkara tingkat Pertama	-	12	-	12

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Analisa penyelesaian kinerja perkara tingkat pertama masih ada tunggakan 12 perkara sedangkan untuk awal tahun 2019 tidak ada sisa perkara tingkat pertama, dikarenakan proses pendaftaran perkara tingkat pertama dimasuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Agustus 2019 masuk 2 perkara pada September 2019 masuk 1 perkara pada Oktober 2019 masuk 3 Perkara, pada Nopember 2019 masuk 4 perkara dan pada Desember 2019 masuk 2 perkara, dengan demikian semua sisa perkara tingkat pertama dimaksud masih dalam proses persidangan, selain itu sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwasannya untuk penyelesaian perkara tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan termasuk minutasi. Sedangkan penyelesaian Perkara pada tingkat banding paling lambat dalam wak 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Pada

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dengan jenis Perkara Kepegawaian sebanyak 11 Perkara dan perkara lain-lain 1 perkara, seluruh perkara tersebut masih dalam proses persidangan dan belum masuk 5 (lima) bulan, seperti yang terlihat dalam tabel sebagai berikut :

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkar	Masuk Tahun 2019	Jumlah	Putus 2019	cabut	Sisa 2019
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepegawaian	-	11	11	-	-	11
2	Lain-lain	-	1	1	-	-	1
Jumlah		-	12	12	-	-	12

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Keadaan Perkara tingkat Banding per 31 Desember 2019

No.	Jenis Perkara	Sisa awal	masuk	putus	Sisa akhir
1.	Perkara tingkat Banding	28	340	338	30

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Analisa penyelesaian kinerja penyelesaian perkara tingkat banding masih ada tunggakan perkara 30 perkara sedangkan tunggakan perkara pada awal tahun 2019 sebanyak 28 perkara. Kalau di analisa bahwa perkara masuk tingkat banding tahun 2019 sebanyak 340 perkara dengan demikian jumlah seluruhnya 368 perkara dan telah diputus sebanyak 338 yang semuanya diputus tepat waktu dan sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2014

angka 2 perkara perkara tersebut diputus belum 3 bulan termasuk minutasi dan dapat dikategorikan diputus tepat waktu dari 338 perkara semua diputusan tepat waktu yang diprosentasikan sebanyak 100 %. Sedangkan yang menyebabkan tunggakan perkara tingkat banding tahun 2019 lebih besar dari tahun 2018. Berikut ini perbandingan capaian Kinerja Penanganan Perkara (KPP) Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel: Perbandingan Capaian Kinerja Penanganan Perkara

Tahun	Sisa Lalu	Masuk	Jumlah	Minu tasi	Sisa	%KPP	Lama Proses		ODP
							1-3	3-6	
2019	28	340	368	338	30	91,85%	338	0	334
					8,15%	100%		98,82%	
2018	66	321	387	359	28	92,76%	355	4	121
					7,24%	98,89%	1,11%	33,70%	
2017	60	376	436	370	66	84,86%	350	20	TIDAK
					15,14%	94,59%	5,41%	ADA	

Sumber : Keaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Kalau dilihat dari tabel perbandingan prosentase tiga tahun terakhir bahwa capaian kinerja yang proses penyelesaian perkara dari tahun 2017 adalah 94,59 % tahun 2018 adalah 98,89 % dan tahun 2019 adalah 100% ini jelas terlihat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menyelesaikan perkara sudah semangat tinggi untuk menyelesaikan dengan tepat waktu yaitu dengan waktu penyelesaian perkara antara 1-3 bulan sesuai anjuran Surat Edaran Ketua Mahkamah RI Nomor 2 tahun 2014 angka 2, apalagi kalau dilihat dari tabel tersebut One Day Publish

(ODP) , sedangkan yang dimaksud dengan One Day Publish (ODP) adalah merupakan maklumat pelayanan kepada publik bahwa Pengadilan Tinggi TUN Jakarta memublikasikan informasi Perkara pada hari yang sama dengan perkara yang diputus, juga dalam memublikasikan putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Pengaju (di tingkat pertama).Seperti yang terlihat dalam tabel tersebut pada tahun 2017 di kolom ODP tidak ada data pada tahun 2018 tertulis 121 perkara atau sekitar 33, 70 %, dan yang pada tahun 2019 tertulis 334 perkara atau sekitar mencapai 98, 82 % ini berarti capaian kinerja secara ODP lebih besar.

Indikator kedua ini merupakan konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio penyelesaian perkara tepat waktu lebih banyak atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan perkara yang diselesaikan, maka akan menekan jumlah perkara sisa/tunggakan ke tingkatan jumlah yang lebih sedikit.

Dilihat Rasio Penyelesaian perkara tepat waktu untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan dikatakan berkinerja baik apabila jumlah sisa perkara dan/atau tunggakan semakin sedikit dari periode sebelumnya.

a. Untuk perkara Tingkat Pertama, dari jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum masuk jangka waktu penyelesaian perkara sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2014 angka 1 yang semua perkara masih dalam proses persidangan.

b. Untuk perkara tingkat Banding, dari jumlah perkara yang masuk dalam tingkat banding 340 perkara, sisa perkara tahun 2018 berjumlah 28 dan pada tahun 2019 telah diputus tepat waktu sejumlah 338 perkara jadi Rasio Penyelesaian perkara tepat waktu (lama proses 0-3 bulan) sebesar 91,84 % , bila di hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Perkara Putus tepat waktu}}{\text{Sisa + Perkara masuk}} \times 100 \% : \frac{338}{368} \times 100 \% : 91,84 \%$$

Capaian Kinerja se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

No	Satuan Kerja	Sisa Lalu	Masuk	Jumlah	Minutasi	Sisa	% KPP	Lama Proses		ODM
								1-5	5-12	
1	PTUN BANDUNG	55	150	205	163	42	79,51%	92,64%	12 7,36 %	97 59,51%
2	PTUN BANJAR MASIN	12	63	75	65	10	86,67%	61 93,85 %	4 6,15%	53 81,54 %
3	PTUN JAKARTA	96	268	364	290	74	79,67 %	254 87,59 %	36 12,41 %	156 53,82 %
4	PTUN PALANGKA RAYA	6	38	44	30	14	68,18 %	30 100 %	0 0,00 %	12 40 %
5	PTUN PONTIANAK	44	43	87	73	14	83,91	37 50,68 %	36 49,32 %	18 24,66 %
6	PTUN SAMARINDA	31	73	104	76	28	73,08	64 84,21 %	12 79 %	5 6,58%
7	PTUN SERANG	11	79	90	71	19	78,89 %	66 92,96 %	5 7,04 %	65 91,55%

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Perkara Banding

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding yang juga berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding, sisa awal tahun 2019 perkara banding 28 perkara, selama periode Januari s.d Desember 2019 perkara banding yang masuk selama tahun 2019 sebanyak 340 perkara dan yang telah diputus sebanyak 338 perkara, sedang sisanya sebanyak 30 perkara banding dengan perincian sebagai berikut :

NO	BULAN	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
1	JANUARI	28	40	29	39
2	PEBRUARI	39	22	26	35
3	MARET	35	24	16	43
4	APRIL	43	39	37	45
5	MEI	45	41	37	49
6	JUNI	49	20	17	52
7	JULI	52	45	35	62
8	AGUSTUS	62	17	36	43
9	SEPTEMBER	43	18	35	26
10	OKTOBER	26	24	18	32
11	NOPEMBER	32	35	19	48
12	DESEMBER	48	15	33	30
13	Jumlah		340	338	

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Perkara Gugatan

Perkara gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sisa awal 2019 sebanyak - perkara, perkara masuk selama periode Januari s.d Desember 2018

adalah 8 perkara, perkara gugatan yang telah diputus sebanyak 8 perkara dan tidak ada sisa perkara gugatan dengan perincian sebagai berikut :

NO	BULAN	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
1	JANUARI	-	-	-	-
2	PEBRUARI	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-
4	APRIL	-	-	-	-
5	MEI	-	-	-	-
6	JUNI	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-
8	AGUSTUS	-	2	-	2
9	SEPTEMBER	2	1	-	3
10	OKTOBER	3	3	-	6
11	NOPEMBER	6	4	-	10
12	DESEMBER	10	2	-	12
Jumlah		-	12	-	12

Sumber : Keganiteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Perkara Kasasi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama selama tahun 2019 sisa awal kasasi 0 perkara, dan selama tahun 2019 dari Januari s.d Desember 2019 telah menerima permohonan kasasi sebanyak 0 perkara kasasi, sisa 0 perkara dengan perincian sebagai berikut :

NO	BULAN	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
1	JANUARI	-	-	-	-
2	PEBRUARI	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-
4	APRIL	-	-	-	-

5	MEI	-	-	-	-
6	JUNI	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-
8	AGUSTUS	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-	-
11	NOPEMBER	-	-	-	-
12	DESEMBER	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Perkara peninjauan Kembali (PK)

Keadaan perkara Peninjauan Kembali tahun 2019 sisa awal 0 perkara, selama periode Januari s.d Desember 2019 masuk sebanyak 0 perkara, dengan perincian sebagai berikut :

NO	BULAN	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
1	JANUARI	-	-	-	-
2	PEBRUARI	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-
4	APRIL	-	-	-	-
5	MEI	-	-	-	-
6	JUNI	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-
8	AGUSTUS	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-	-
11	NOPEMBER	-	-	-	-
12	DESEMBER	-	-	-	-
13	Jumlah	-	-	-	-

Perkara yang dimohonkan eksekusi

Jumlah perkara gugatan yang dimohonkan eksekusi oleh para pihak selama Januari s.d Desember 2019 nihil perkara.

Penyelesaian Perkara

- Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding, juga sebagai pengadilan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 jo Pasal 51 ayat 3 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding, selama periode Januari sampai dengan Desember 2019 telah menerima perkara banding sebanyak 340 perkara (28 + 340) (sisa awal dan perkara masuk tahun 2019) dan telah diputus sebanyak 338 perkara.

Sisanya sebanyak 30 perkara.

**Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
Tahun 2019**

No.	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertahanan	16	128	144	136	1	7
2	Kepegawaian	7	79	86	74	-	12
3	Perijinan	1	22	23	20	-	3
4	Badan Hukum	-	10	10	9	-	1
5	Merk/HAKI	-	1	1	1	-	0
6	Lingkungan Hidup	2	7	9	9	-	0
7	Lelang	-	5	5	5	-	0
8	Pengadaan tanah /Perumahan	-	1	1	1	-	0
9	Lain-lain	2	87	87	82	-	7
10	Permohonan / PW	-	-	-	-	-	-

Jumlah	28	340	368	338	1	30
--------	----	-----	-----	-----	---	----

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

2. Tabel Kinerja Penanganan Perkara TUN pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sebagai Pengadilan tingkat Pertama Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah beban	Putus 2018	Dikembalikan	Sisa 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepegawaian	-	11	11	-	-	11
2	Lain - lain	-	1	1	-	-	1
Jumlah		-	12	12	-	-	12

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

3. Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Tahun 2019

Wilayah PT TUN	Menguatkan	Dikabulkan	Dicabut	Tdk Dapat diterima	Jumlah
1	2	3	4	5	6
PTTUN Jakarta	131	77	1	129	338

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

Pada Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding telah memutus perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sejumlah 338 perkara dari sejumlah 338 perkara, yang diputus tepat waktu sejumlah 338 perkara, dengan demikian diselesaikan dengan tepat waktu 100 %.

4. Tabel : Rerata Waktu Memutus Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Tahun 2019

No	Pengadilan	Rerata Waktu Memutuska/Bulan				Jumlah
1	2	1-3	3-6	6-12	>12	6
1	PTTUN JAKARTA	338	-	-	-	338

5. Tabel Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara 2019

No	Pengadilan	Rerata Waktu Memutus/bulan			Jumlah
		1-5	5-12	>12	
1	2	3	4	5	6
1	PTUN BANDUNG	45	79	35	159
2	PTUN BANJARMASIN	39	-	-	39
3	PTUN JAKARTA	222	65	-	287
4	PTUN PALANGKARAYA	16	-	-	16
5	PTUN PONTIANAK	18	17	-	35
6	PTUN SAMARINDA	37	9	-	46
7	PTUN SERANG	71	-	-	71

JUMLAH	448	170	35	653
PTTUN JAKARTA sbg Pengadilan TK I	-	-	-	-

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

- a. Pada Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama, yang tidak mengajukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama yaitu yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi berjumlah 0 perkara.
- b. Pada Tahun 2019 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu yang tidak mengajukan Upaya hukum Peninjauan Kembali berjumlah 0 perkara. Karena 12 perkara masih dalam proses persidangan.

Keuangan Perkara

Keadaan keuangan perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama selama periode Januari s.d Desember 2019 sebagai berikut :

Laporan Keuangan Tingkat Pertama tahun 2019

No.	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1.	Sisa Awal	-	-
2.	Penerimaan bulan ini	Rp 42.000.000,-	-
3.	Biaya Panggilan	-	Rp. 672.000,-
4.	Biaya Pemberitahuan	-	-
5.	Biaya Pemeriksaan setempat	-	Rp. 30.000.000,-
6.	Biaya Penterjemah/sumpah/Saksi	-	-
7.	Biaya pengiriman Berkas	-	-
8.	Biaya materai	-	-
9.	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	-	Rp. 550.000,-
10.	Biaya Media Massa	-	-
11.	Biaya lain-lain (ATK)	-	-
12.	Pengiriman Biaya Perkara	-	Rp. 1.200.000,-
13.	Pengembalian sisa panjar	-	Rp. 30.000,-
		Rp. 42.000.000,-	Rp. 32.452.000,-
	Saldo	-	Rp. 9.548.000,-
	Jumlah	Rp. 42.000.000,-	Rp. 42.000.000,-

Sumber data : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta per 31 Desember 2019.

Laporan Keuangan Tingkat Banding tahun 2019

No.	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1.	Sisa Awal	Rp. 269.000,-	-
2.	Penerimaan bulan ini	Rp 90.512.850,-	-
3.	Biaya Panggilan	-	-
4.	Biaya Pemberitahuan	-	Rp. 21.892.500,-
5.	Biaya Pemeriksaan setempat	-	Rp. 30.000.000,-
6.	Biaya Penterjemah/sumpah/Saksi	-	-
7.	Biaya pengiriman Berkas	-	-
8.	Biaya materai	-	Rp. 1.878.000,-
9.	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	-	Rp. 3.695.000,-
10.	Biaya proses dan Pemberkasan	-	Rp. 45.330.500,-
11.	Biaya lain-lain (ATK)	-	Rp. 14.085.000,-
		Rp. 90.781.850,-	Rp. 86.881.000,-
	S a l d o		Rp. 3.900.850,-
	J u m l a h	Rp. 90.781.850,-	Rp. 90.781.850,-

Sumber data : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta per 31 Desember 2019.

Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan yang diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Sesuai dengan pedoman Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Berikut ini tabel penanganan pengaduan yang ada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kurun waktu tahun 2018 :

NO.	PENGADUAN	JUMLAH SURAT
1	Pengaduan yang masuk	: 41 surat
2	Pengaduan yang sudah diselesaikan	: 4 surat
3	Pengaduan yang masih diproses	: -
4	Pengaduan yang diteruskan ke Bawas MARI	: -
5	Pengaduan yang tidak layak ditindak lanjuti	: 37 surat (Tembusan/Arsip)

4.2. Analisis Kegagalan Kinerja

Ada beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau belum mencapai prosentase maksimal yaitu salah satunya kegiatan peningkatan akseptabilitas para pencari keadilan atas putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimana belum mencapai hasil yang memuaskan. Tingkat akseptabilitas yang berada di bawah 100 % mewujudkan bahwa perlunya peningkatan kemampuan dan profesionalitas aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menangani banding maupun gugatan, sehingga lebih membawa kepuasan hukum bagi para pencari keadilan sehingga putusan perkara baik banding maupun gugatan dapat diterima dan upaya hukum untuk tingkat yang lebih tinggi dapat ditekan rendah, itu artinya sudah ada kepuasan tersendiri bagi para pencari keadilan. Peningkatan kemampuan, keahlian dan profesionalitas penegak hukum dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai kegiatan antara lain diklat, bimbingan teknis dan pengawasan reguler baik dari internal maupun dari APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah pegawai yang belum edial dengan jumlah pekerjaan yang harus ditangani merupakan masalah yang terus terjadi setiap tahun. Sehingga untuk memenuhi penyelesaian pekerjaan dilakukan efisiensi terhadap aparatur pegadilan agar dapat menangani beberapa pekerjaan. Pada dasarnya efisiensi sumber daya aparatur adalah penanganan beberapa pekerjaan yang relevan dan saling berkaitan dilaksanakan oleh 1(satu) atau 2 (dua) orang pegawai karena pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di Bagian Kepaniteraan contohnya : jumlah tenaga staff lebih sedikit atau tidak sebanding dengan jumlah tenaga teknis kepaniteraan, dilihat dari data di Sub.Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi jumlah tenaga kepaniteraan dan

juror pengganti 29 orang sedangkan tenaga staff di Kepaniteraan hanya berjumlah 5 (lima) orang.

Faktor-faktor sumber daya yang memiliki andil dan menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia yang ada sehingga menyulitkan penempatan pegawai yang proporsional.
2. Sulitnya minta tambahan formasi pegawai dimana jumlah pegawai yang ada terutama staf tidak dapat mencukupi dibanding dengan pekerjaan yang ada dengan kata lain satu sub bagian hanya memiliki maksimal 3 staf. Hal ini sangat mengganggu kinerja aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang semakin lama semakin banyak dikritisi oleh masyarakat.
3. Penempatan formasi pegawai baru ditetapkan oleh pusat, tidak memenuhi aspirasi akan permohonan penambahan formasi pegawai.
4. Kurangnya kualitas sumber daya manusia.

Penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sangatlah dipergunakan sebaik mungkin. Untuk sumber daya manusia yang memang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini sangat kekurangan tetapi bisa diatasi dengan baik. Tenaga honorer yang ada tidak seimbang dengan keadaan kantor yang sudah menempati gedung baru dengan banyaknya alat elektronik yang butuh kepintaran dalam mengurus dan membersihkannya. Dan juga terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan tenaga yang minim berusaha untuk bisa melakukan semua pekerjaan itu dengan baik. Dengan pendekatan yang baik yang dilakukan pimpinan kantor semua dapat diatasi tanpa beban. Tugas pokok dan fungsi yang ada pada masing-masing tenaga honorer maupun pada pegawai Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mendapat keberhasilan dengan ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2018 maupun sasaran strategis jangka menengah.

Dalam menjawab berbagai permasalahan tentang sumber daya tersebut, maka dibutuhkan suatu langkah-langkah antara lain :

1. Penambahan formasi pegawai baru harus memperhatikan peta kekuatan pegawai pada masing-masing satuan kerja.
2. Dalam menempatkan pegawai sedapat mungkin mempertimbangkan aspirasi satuan kerja di daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkala dengan memperbanyak kegiatan bimbingan teknis dan workshop dengan sistem memperbanyak simulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
4. Mengusulkan penambahan pegawai dan menerima pegawai melalui jalur mutasi.
5. Mengusulkan peningkatan anggaran belanja pada DIPA pada tahun anggaran 2021 khususnya yang berkenaan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk realisasi anggarannya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengajukan anggaran DIPA yang telah diatur sebaik mungkin untuk keperluan kantor. Pengajuan ini sesuai dengan rencana strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Terpenuhinya sasaran strategis yang ada indikator kinerja utama membawa dampak positif bagi pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Anggaran yang diajukan juga dipergunakan di bagian kepaniteraan perkara maupun hukum untuk kemajuan pelayanan terhadap masyarakat terutama para pencari keadilan.

6. Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2019 ada yang berhasil dan gagal mencapai target kinerja. Keberhasilan dan kegagalan tersebut perlu untuk dianalisa secara komprehensif agar menjadi tolok ukur pada program dan kegiatan tahun berikutnya. Analisa terhadap program dan kegiatan yang berhasil maupun yang gagal terangkum dalam hasil berikut ini :

Tabel Kinerja Penanganan Perkara TUN pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sebagai Pengadilan tingkat Pertama Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah beban	Putus 2018	Dikembalikan	Sisa 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepegawaian	-	11	11	-	-	11
2	Lain - lain	-	1	1	-	-	1
Jumlah		-	12	12	-	-	12

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tabel Kinerja Penanganan perkara TUN pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019 :

No.	Jenis Perkara	Sisa tahun 2018	masuk	Putus 1-3	Putus 3-6	Putus 6-12	Putus >12	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat Banding	28	340	338		0	0	30

Indikator Kinerja : Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja persentase Sisa Perkara yang di selesaikan pada Tahun 2019 berhasil mencapai target kinerja, yaitu 100%. Keberhasilan tersebut karena seluruh tunggakan perkara untuk tingkat banding tahun 2018 (28 perkara) berhasil diselesaikan secara tepat waktu.

Indikator Kinerja : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Persentase perkara tingkat pertama mencapai 0 % dikarenakan dari 12 perkara yang masuk (11 perkara Kepegawaian + 1 perkara lain-lain) belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan masih dalam waktu kurang dari 5 bulan, Untuk sisa perkara banding dari 28 perkara banding seluruhnya diputus kurang dari 3 bulan, dengan demikian secara prosentase penyelesaian sisa perkara tingkat banding tepat waktu yaitu 100 %, pada Tahun 2019 prosentase untuk keseluruhan penyelesaian perkara yang sebesar 91,85 % tidak berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%. Keberhasilan mencapai jumlah prosentase tersebut karena perhitungan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu hanya mengukur perkara yang diselesaikan pada tahun 2019. Bukan menghitung jumlah perkara kurang dari 3 bulan (sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Keberhasilan tersebut diatas sudah melampaui target sebagai Peradilan yang Agung yang mana persyaratan penyelesaian perkaranya dapat mencapai lebih dari 70 % , perkara yang baru masuk pada triwulan IV Tahun 2019 pada bulan ke 11, 12 sehingga penyelesaiannya melewati tahun, sehingga menjadi sisa perkara tahun berikutnya.

Indikator kinerja prosentase penurunan sisa perkara.

Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 sebanyak 100 % dengan demikian berhasil terjadi penurunan sisa perkara yang pada tahun 2018 sisa perkara 28 untuk tahun 2019 sisa perkara hanya 30 perkara. Dengan catatan disini bahwa perkara secara prosentase naik, perkara masuk 2019 dibanding perkara masuk 2018 naik 1,05 % ($\frac{340}{321} \times 100$ %).

sedangkan Kinerja Penanganan Perkara (KPP) 2019 turun (92,76 %- 91,85 %) sebesar 0,91%.

Berikut dapat dilihat tabel Capaian Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sampai dengan 31 Desember 2019.

Indikator Kinerja : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali pada tahun 2019 sebesar 0 %, ini karena baik permohonan Kasasi dan Permohonan Peninjauan Kembali belum ada sampai akhir Desember 2019, semua perkara tingkat pertama masih dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.

Program atau kegiatan yang dapat menunjang sekali untuk keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ke masa yang akan datang. Program-program ini diantaranya yang sangat diperlukan yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Program ini berisikan kegiatan yang berkaitan dengan dukungan teknis penyelesaian perkara dan pembinaan serta sosialisasi yang diperlukan sekali

untuk membina dan mendidik aparatur peradilan mempunyai jiwa bertanggung jawab dan bekerja sesuai dengan prosedur dan tidak melakukan KKN.

Penyelesaian perkara ini ditujukan untuk para pencari keadilan agar merasa dilayani dengan baik dan merasa puas, Pelayanan penyelesaian perkara ini harus didukung adanya kualitas sumber daya manusia yang memenuhi syarat kejujuran, kepintaran. Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk tertib administrasi perkara. Kualitas sumber daya manusia yang baik dan layak dapat menunjang keberhasilan suatu unit kerja dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

2. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung RI

Program ini berisikan kegiatan peningkatan kualitas layanan baik internal maupun eksternal. Layanan tersebut juga sangat mendukung untuk kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjadi lebih baik. Kualitas layanan tersebut harus didahulukan untuk internal terlebih dahulu. Dengan layanan internal yang baik sangat menunjang layanan eksternal dan dapat menjadikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai tempat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di jalur hukum.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.

Program ini berisikan kegiatan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor.

Ketiga program yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini sangat mendukung untuk jalannya rencana strategis.

Ketiga program tersebut pelaksanaannya harus diawasi oleh instansi yang lebih tinggi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan tetap dijalurnya.

B. Realisasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Undang-Undang RI, Peraturan Presiden RI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019.

- **Neraca**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada 31 Desember 2019.

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 526704 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	20178	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	55,561,111	33.013.342	22.547.769	66,29
JUMLAH ASET LANCAR	55,561,111	33.013.342	22.547.769	66,29
ASET TETAP				
Tanah	110,302,727,000	103.802.988,000	6,499,739,000	6,26
Peralatan dan Mesin	4,759,171,822	4.933.804.825	(174,633,003)	(3,53)
Gedung dan Bangunan	33,952,409,000	22,360,806,000	11,591,603,000	51,83
Jalan, Irigasi dan Jaringan	273,145,000	273.145.000	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	12,506,576	12,506,576	0	0,00
Akumulasi Penyusutan	(5,865,883,271)	(4.740.417.950)	(1,123,165,321)	23,69
JUMLAH ASET TETAP	143,436,076,127	126.642.832.451	16,793,243,676	13,26
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	147,385,000	150.355,000	(2,970,000)	(1,97)
Aset Lain-lain	362,000	362.000	0	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(12,242,000)	(15.212.000)	2,970,000	(19,52)
JUMLAH ASET LAINNYA	135,505,000	135.505.000	0	0,00
JUMLAH ASET	143,627,142,238	126.811.350.793	16,815,791,445	13,26
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				

Utang Kepada Pihak Ketiga	23,081,131	60.044.523	(36,963,392)	(61,55)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23,081,131	60.044.523	(36,963,392)	(61,55)
JUMLAH KEWAJIBAN	23,081,131	60.044.523	(36,963,392)	(61,55)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	143,604,061,107	126.751.306.270	16,852,754,837	13,29
JUMLAH EKUITAS	143,604,061,107	126.751.306.270	16,852,754,837	13,29
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	143,627,142,238	126.811.350.793	16,815,791,445	13,26

**NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 526704 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
TIDAK ADA LAPORAN	0

Dalam mengelola keuangan negara, pembelanjaan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

a. Belanja pegawai

- Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pegawai seperti gaji pegawai, tunjangan isteri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan (struktural/fungsional), tunjangan umum dan tunjangan lainnya.

b. Belanja Barang

- Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan belanja setiap bulannya untuk keperluan sehari-hari kantor seperti belanja keperluan perkantoran (ATK, internet, satpam, sopir dan pesuruh) belanja perjalanan dinas, belanja daya dan jasa, belanja pemeliharaan aset bergerak dan belanja lainnya.

c. Belanja Modal

- Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan belanja pengadaan perlengkapan sarana gedung, belanja pengadaan meubelair, belanja pengadaan alat pengolah data, belanja pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor).

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 526704 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NO	0	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	0	12.733.586	12.733.586	0,00	0	608	608	0,00
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	12.733.586	0,00	0	608	608	0,00
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)		0	12.733.586	12.733.586	0,00	0	608	608	0,00
B	BELANJA NEGARA	14,642,243,000	14,427,931,293	(214,311,707)	98,54	12,600,982,000	14,230,109,440	1,629,127,440	112,93
B.I.1	Rupiah Murni	12,397,215,000	12,383,516,800	(13,698,200)	99,89	10,833,384,000	12,469,307,115	1,635,923,115	115,10
B.I.1.a	Belanja Pegawai	2,11,028,00	1,915,383,913	(097,644,087)	90,65	1,655,098,000	1,648,414,82501	(6,683,175)	99,60
B.I.1.b	Belanja Barang	132,000,000	129,030,580	(2,969,420)	97,75	112,500,000	112,387,500	(112,500)	99,90
B.I.1.c	Belanja Modal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.1.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.2	Pinjaman Dan Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.2.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
JUMLAH BELANJA		14,642,243,000	14,427,931,293	(214,311,707)	98,54	12,600,982,000	14,230,109,440	1,629,127,440	112,93
C	PEMBIAYAAN	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 526704 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NO	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.I.2	Non perbankan dalam negeri (Neto)	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan pinjaman luar negeri	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran cicilian pokok utang luar negeri	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN (C. 1 + C. 2)		0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (TUN)
 WILAYAH/PROPINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 526704 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NO	0	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	28.500.000	4.763.500	(23.763.500)	16,71	0	0	0	0,00
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	28,500,000	4,763,500	(23,736,500)	16,71	0	0	0	0,00
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)		28,500,000	4,763,500	(23,736,500)	16,71	0	0	0	0,00
B	BELANJA NEGARA								
B.I.1	Rupiah Murni	167,000,000	158,065,600	(8,934,400)	94,65	0	0	0	0,00
B.I.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.1.b	Belanja Barang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.1.c	Belanja Modal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.1.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2	Pinjaman Dan Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.1.2.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
JUMLAH BELANJA		167,000,000	158,065,600	(8,934,400)	94,65	0	0	0	0,00
C	PEMBIAYAAN	0	0	0	0,00	0		0	0,00
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (TUN)
 WILAYAH/PROPINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 526704 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NO	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.I.2	Non perbankan dalam negeri (Neto)	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan pinjaman luar negeri	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran cicilian pokok utang luar negeri	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN (C. 1 + C. 2)		0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai 2 (dua) program untuk kelancaran dalam fungsi dan sub fungsi kegiatan seperti :

Pengelolaan Keuangan

1. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung RI :

Realisasi Anggaran bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar Rp. 14.122.138.000,- (Empat belas milyar seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yaitu terdiri :

a). Belanja Pegawai :

Pagu : Rp. 12.397.215.000,-

Realisasi : Rp. 12.383.516.800,-

Sisa : Rp. 13.698.200,-

b). Belanja Barang :

Pagu : Rp. 2.113.028.000,-

Realisasi : Rp. 1.915.383.913,-

Sisa : Rp. 197.644.087,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.

Yaitu :

Pagu : Rp. 132.000.000,-

Realisasi : Rp. 129.030.580,-

Sisa : Rp. 2.969.420,-

**Tabel Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
per 31 Desember 2019**

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%REAL ANGG	SISA DANA	% REAL ANGG
1	2	3	4	5	6	7
51	Belanja Pegawai	Rp.12.397.215.000	Rp. 12.383.516.800	99,54%	Rp. 13.698.200	0,46%
52	Belanja Barang	Rp. 2.113.028.000	Rp. 1.915.383.913	90,65%	Rp. 333.034.351	9,35%
53	Belanja Modal	Rp. 132.000.000	Rp. 129.030.500	97,75%	Rp. 2.969.420	3,35%
Jumlah		Rp.14.642.243.000	Rp.14.195.110.449	96,94%	Rp.447.132.551	3,06%

Dalam Program ini terdapat kegiatan :

- Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara dengan keluaran :
 - Terdapat kegiatan belanja perjalanan dinas luar.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 ini merupakan upaya untuk melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama tahun 2019.

Adapun kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga lain sehingga akan terwujud good governance.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berupaya untuk mewujudkan pengadilan yang bersih dan berwibawa sebagai pondasi dasar untuk melanjutkan pencapaian tujuan dan visi pada tahun-tahun berikutnya. Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, dan kami usahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana seperti yang diharapkan.

Pencapaian seluruh sasaran strategis menunjukkan komitmen dari seluruh jajaran untuk berkontribusi nyata dan berperan serta dalam program pelayanan hukum secara nasional. Keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja sasaran merupakan poses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang perlu diteliti guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal dan maksimal melalui pendekatan efisiensi dana yang tersedia dan perencanaan yang baik.

Laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari lembaga peradilan, karena Indikator Kinerja Utama 2019, Rencana Kinerja tahun 2019 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2019 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019.

Laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2018 diharapkan dapat memberi gambaran tentang berbagai kegiatan atau capaian kinerja yang telah dilakukan serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bertekad secara bertahap selalu berusaha adanya perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan dari berbagai pihak, antara lain : masyarakat pencari keadilan yang mengharapkan adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan terlaksana dengan baik apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.

Menyadari adanya keterbatasan dalam berbagai hal maka laporan ini mungkin jauh dari kesempurnaan baik dalam hal penyajian, isi maupun kekurangan dalam pelaksanaannya, namun harapan kami semoga masyarakat atau pihak yang berkepentingan mendapatkan gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan tugas dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan maupun pengelolaan prasarana dan sarana serta keuangan (APBN/RKAKL/DIPA) tahun anggaran 2019. Semoga dimasa mendatang dengan adanya masukan dari masyarakat terhadap LkjIP ini penyempurnaan akan dilakukan terus dan berkelanjutan.

Kiranya Laporan Kinerja Insatansi pemerintah (LKjIP) tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operasional Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa yang akan datang.

B. SARAN-SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan core bussines (ciri khas) dari fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
3. Dalam menerapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah karena berdasarkan analisis pengukuan kinerja masih ada capaian kinerja hingga 100 %.
4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen objektif yang tidak berpihak.
5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrumen punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (Renstra, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
6. Keterbukaan dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
7. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimasa mendatang, kiranya Mahkamah Agung RI dapat meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran operasional kantor, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana gedung serta anggaran belanja modal dan dapat terealisasinya dalam DIPA 2019.

8. Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka dimohonkan pada Mahkamah Agung dapat mengadakan pelatihan baik dibidang teknis maupun non teknis, yang lebih khusus dibidang IT yang berguna untuk kemajuan dibidang peradilan khususnya Peradilan Tata Usaha Negara.
9. Mahkamah Agung RI memberikan tambahan anggaran untuk pembangunan rumah dinas,

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim tinggi, pejabat struktural, pejabat fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai rencana kinerja yang telah tersusun.

Namun masih ada beberapa rencana kinerja yang belum dapat diselesaikan sesuai yang ditargetkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara menunjukkan angka yang cukup baik, sebagai mana diuraikan di atas. Meski secara kumulatif nilai capaian akhir tahun 2019 belum berhasil dengan baik sesuai harapan.